

**PARTISIPASI DELEGASI DPR RI DALAM PERTEMUAN  
THE 2<sup>ND</sup> MIKTA SPEAKER'S CONSULTATION DI HOBART, TASMANIA  
5-7 OKTOBER 2016**

Ketua DPR RI, **Ade Komarudin**, telah menghadiri acara *the 2<sup>nd</sup> MIKTA Speaker's Consultation*, pertemuan Konsultasi Ketua-ketua Parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, and Australia) di Hobart, Australia pada tanggal 5-7 Oktober 2016. Mendampingi Ketua DPR Wakil Ketua BKSAP DPR RI **Syaifullah Tamliha**, Anggota BKSAP **Siti Hediati Soeharto** dan Anggota Komisi IV DPR RI **Ichsan Firdaus**,

Pertemuan Parlemen MIKTA dibuka secara resmi oleh Presiden Senat Australia **Stephen Parry**. MIKTA memiliki struktur keanggotaan yang unik, di mana kelima negara didalamnya merupakan *middle powers*. Kelompok negara MIKTA memiliki populasi lebih dari 500 juta jiwa dengan GDP mencapai USD 5,8 triliun per tahun. Sebagai anggota G20, negara-negara MIKTA menduduki peringkat 12,14,15,16, dan 17 ekonomi terbesar di dunia.

Pertemuan *the 2<sup>nd</sup> MIKTA Speaker's Consultation di Hobart, Australia* terdiri dari 5 sesi diskusi. Sesi pertama membahas aspek keamanan dalam konsep keterbukaan parlemen. Walaupun memiliki mekanisme keamanan internal yang berbeda-beda, delegasi MIKTA menyepakati pentingnya akses masyarakat terhadap parlemen. Keamanan parlemen sebagai obyek vital negara harus menjadi perhatian utama.

Ketua DPR RI **Ade Komarudin** dalam intervensinya menyampaikan bahwa sebagai simbol demokrasi, Parlemen harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sesuai dengan filosofinya, karakter Parlemen adalah adanya partisipasi masyarakat yang kontinyu, tidak hanya terbatas pada waktu pemilihan umum. Untuk menjalankan fungsi representatifnya, jarak antara anggota Parlemen dengan konstituennya harus diminimalisir.

Kompleks Parlemen dapat menjadi target *cyber crime* dan terorisme, sehingga faktor keamanan harus diperhatikan dengan baik. Diperlukan keseimbangan antara faktor keamanan dan keterbukaan publik.

Ketua DPR RI **Ade Komarudin** memimpin sesi kedua dengan topik *Open Governments* di negara-negara MIKTA. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok negara MIKTA yang merupakan anggota dari *Open Government Partnership* (OGP), sebuah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mengawal komitmen pemerintah dalam hal mendorong transparansi, memberdayakan masyarakat, memberantas korupsi dan membangun teknologi untuk memperkuat tata-kelola.

Indonesia menginisiasi *Open Government Indonesia* (OGI) pada 2011 sebagai sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif. OGI merupakan upaya kolaboratif dan partisipatif antarpemangku kepentingan, terutama pada level pemerintah dan masyarakat sipil.

Ketua DPR RI **Ade Komarudin** menegaskan bahwa Parlemen memiliki peranan vital dalam memastikan terealisasinya komitmen *Open Governments*. Oleh karena itu, Parlemen juga hendaknya mendukung pengimplementasian National Action Plan. Dengan komitmen yang kuat terhadap *Open Governments*, parlemen akan semakin maju dalam menggagas dan memajukan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai tiang pancang demokrasi.

Sesi ketiga membahas keterbukaan publik dalam Keterbukaan Parlemen. Dalam intervensinya, Ketua DPR RI menjelaskan bahwa masa depan Indonesia terletak pada landasan demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pasca berlangsungnya era reformasi 1998, DPR RI dituntut untuk bertransformasi menjadi parlemen modern yang transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mengacu pada fungsi-fungsi keparlemenan yang terdiri dari anggaran, legislasi dan pengawasan, tetapi juga mengenai kualitas representasi di mana aspirasi masyarakat terefleksikan secara nyata dalam berbagai formulasi kebijakan.

*The 2<sup>nd</sup> MIKTA Speaker's Consultation* juga membahas pentingnya akuntabilitas parlemen yang dapat diwujudkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI **Ade Komarudin** menyampaikan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.

Anggota legislatif di Indonesia berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya. Dalam hal ini, LHKPN merupakan alat ukur akuntabilitas pejabat publik guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara. Perwujudan akuntabilitas anggota legislatif melalui LHKPN mencerminkan kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral politisi sebagai penyusun kebijakan publik. DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang ada guna membangun sistem politik demokrasi Indonesia yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam sesi terakhir, parlemen MIKTA membahas independensi parlemen dari pihak eksekutif. Ketua DPR RI dalam intervensinya menyampaikan bahwa pada prinsipnya, kelembagaan DPR tidak akan dapat dilemahkan oleh eksekutif. Jaminan independensi DPR dari kekuasaan eksekutif sejauh ini telah terakomodasi dalam Konstitusi Nasional. Kendati demikian, dalam beberapa hal, DPR dan unit pendukungnya, terutama dalam aspek pelaksanaan keuangan dan penataan kepegawaian masih tergantung pada eksekutif. DPR tengah berupaya untuk mendorong otonomi kelembagaan sehingga dapat menjadi lembaga kuat penyeimbang

eksekutif. Hal terkait independensi ini baik dalam kewenangan, peraturan, pengelolaan anggaran hingga kepegawaian semestinya dapat terlaksana.

Pertemuan *the 2nd MIKTA Speaker's Consultation* menghasilkan *outcome document* dalam bentuk *joint media release* yang menggarisbawahi kesepakatan para parlemen MIKTA mengenai peranan penting dan potensi MIKTA sebagai forum untuk saling bertukar pandangan dan mempromosikan demokrasi demi mewujudkan *good governance*. Selain itu, para Ketua DPR juga menyatakan dukungan terhadap isu denuklirisasi Korea Utara dan pemerintahan demokratis yang baru terbentuk di Turki. Para Ketua Delegasi berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama antarparlemen MIKTA melalui pertemuan *MIKTA Speaker's Consultation* ke-3 yang akan diadakan di Turki pada tahun 2017 mendatang.

Di sela-sela Pertemuan *the 2<sup>nd</sup> MIKTA Speaker's Consultation*, Ketua DPR RI **Ade Komarudin** didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP **Syaifullah Tamliha** mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Korea. Dalam pertemuan tersebut, kedua Ketua Parlemen sepakat untuk menggiatkan kegiatan saling kunjung, yang tidak hanya melibatkan anggota parlemen, tetapi juga para pengusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Selain produk komoditas konsumsi, Korsel memiliki sejumlah sektor unggulan, yaitu infrastruktur, ICT dan senjata. Diversifikasi kerja sama ekonomi antara kedua negara hendaknya dapat ditingkatkan.

Ketua DPR RI telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kerja sama antarparlemen MIKTA. Walaupun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, MIKTA terdiri dari negara-negara demokratis. Selain mendukung gerakan *Open Governments*, parlemen negara-negara MIKTA juga berkomitmen untuk menciptakan parlemen yang terbuka dan dapat menjamin partisipasi masyarakat. Partisipasi Ketua DPR RI dalam *MIKTA Speaker's Consultation* merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. MIKTA juga dapat menjadi forum yang strategis bagi Indonesia untuk menggalang dukungan negara-negara *middle powers* dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan Indonesia.

\*\*\*